

PENGARUH KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KOTA KEDIRI
JAWA TIMUR

Oleh:
NovieAstuti
POLITEKNIK KEDIRI

ABSTRACTION

The purpose of this study was to test the direct effect of behavioral factors such as the organization's supervisor support, clarity of purpose and training to improve the usefulness of the Regional Financial Accounting System. This study uses behavioral factors as the Organization of Independent Variables and Regional Financial Accounting System as Dependent Variables.

The samples were as many as 15 government agencies in the town of Kediri using sample adjustment. Questionnaires were distributed 100 kuesioner number and returned to the author of a number of 75 questionnaire. Data already entered if using multiple linear regression.

The results of data processing are superior support variable has a value of $3.438 t =$ greater than t table is ($3.438 > 2.042$) with a p-value of 0.001 is accepted at significance level of 5% ($p < 0.05$). A positive value indicates a positive influence. This means that support supervisor affect the usefulness of financial accounting system daerah and H1 are accepted.

Variable clarity of purpose has - 3,047 t value is greater than t table of 2.042 which is $3.047 > 2.042$ or p-value of 0.003 is accepted at significance level of 5% ($p < 0.05$). That is the purpose of clarity effect on the area of financial accounting system usability and H2 are accepted.

Training variables have the value of 1,346 $t =$ smaller than t table of 2.042 which is $1.346 < 2.042$ or p-value of 0.183 was rejected at the 5% significance level ($p > 0.05$).

Keywords: Behavioral Factors Organization, Regional Financial Accounting System.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *powershare* pada setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Distribusi kewenangan/kekuasaan, disesuaikan dengan kewenangan pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan. Proses pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, diperlukan informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan.

Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Tujuan pemerintah dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi

akuntansi (Sri Dewi Wahyundaru, 2001). Pernyataan Sri dewi wahyundaru tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem keuangan lama yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan saat ini.

Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar

dan Hopwood, 1995). Faktor perilaku yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi faktor organisasional (pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan) yang juga berpengaruh dalam implementasi sistem yang berkaitan dengan masalah individu personal.

Penelitian tentang implementasi inovasi pengukuran kinerja pemerintahan dilakukan oleh Cavalluzzo dan Ittner (2004) menunjukkan bahwa beberapa faktor teknik dan faktor organisasional meliputi komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, pelatihan dan mandat dari legislatif berhubungan dengan implementasi inovasi sistem pengukuran. Chenhall (2004) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor perilaku selama implementasi akan meningkatkan kegunaan sistem ABCM(*Activity Based Costing Manajemen*) pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian sistem baru, perlu dipertimbangkan faktor-faktor perilaku seperti komitmen dari sumber daya yang terlibat, dukungan manajemen puncak, kejelasan tujuan dan pelatihan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan negara dalam rangka menjadikan *governance* dan *clean governance*. Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di pemerintah kota Kediri Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di pemerintah kota Kediri Jawa Timur?

3. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di pemerintah kota Kediri Jawa Timur?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian dijelaskan sebagai berikut : menguji pengaruh dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di pemerintahan kota Kediri Jawa Timur

Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih mendalam mengenai pengaruh keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di pemerintah kota Kediri Jawa Timur.
2. Hasil penelitian ini secara akademis adalah sebagai masukan bagi kegiatan penelitian pengembangan wawasan dan dapat memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Hasil penelitian ini secara praktis dapat sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN

TEORI

Perilaku Organisasi

Perilaku Organisasi adalah studi sistematis tentang tindakan dan sikap yang dituhukan oleh orang-orang dalam organisasi (Robbins, 2005). Tampubolon (2004) menungkapkan perilaku keorganisasian merupakan studi mengenai perilaku manusia dalam organisasi yang mana dengan menggunakan ilmu pengetahuan tentang bagaimana manusia bertindak dalam organisasi. Perilaku organisasi ini mendasar

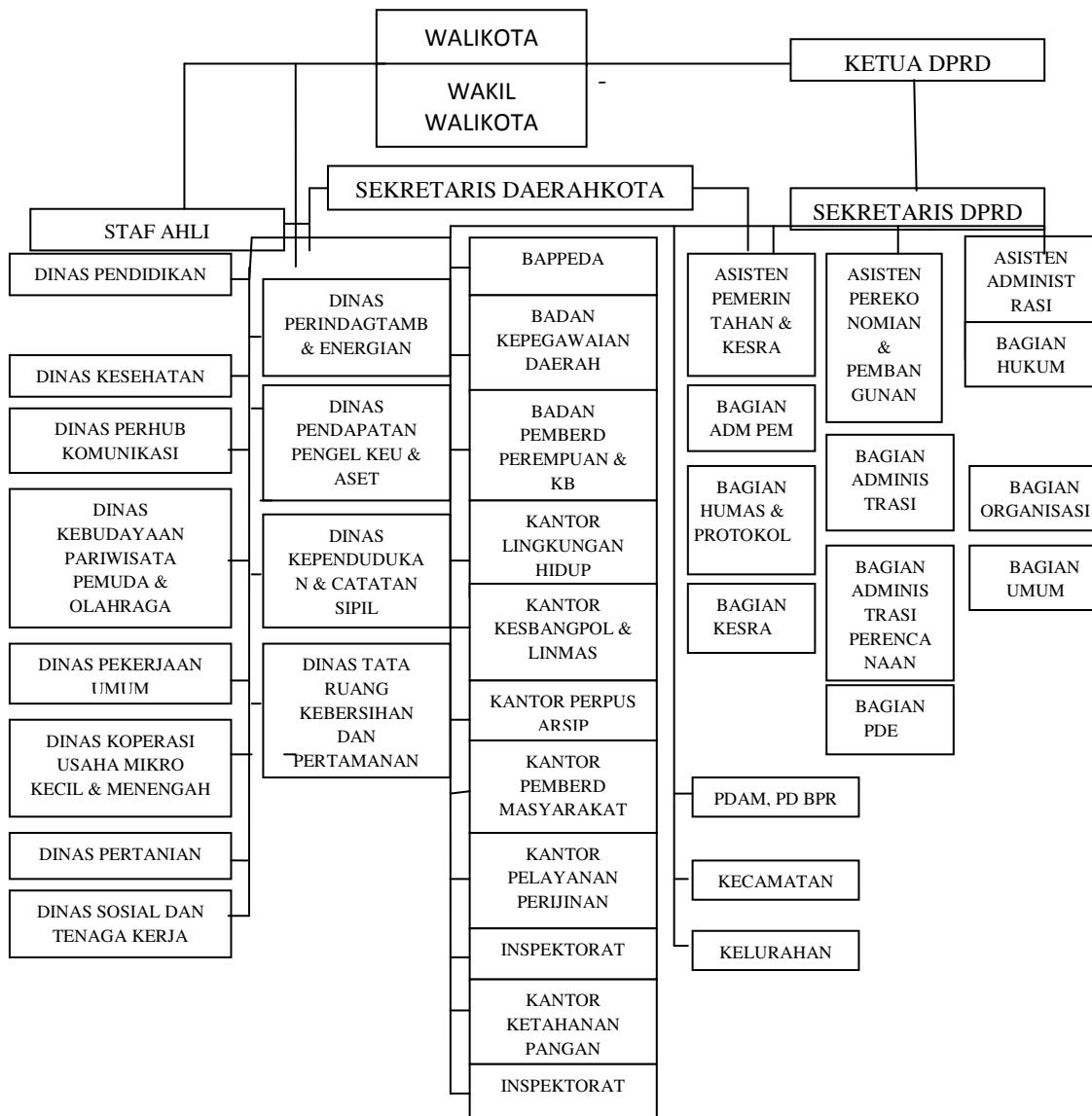
pada analisis terhadap manusia yang ditujukan bagi kemanfaatan orang. Secara singkat Luthsan (2005) mengemukakan perilaku organisasi sebagai pemahaman, prediksi, dan manajemen perilaku manusia dalam berorganisasi. Sikap seseorang dalam merespon suatu inovasi seperti diimplementasikannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan di dalam organisasi dan faktor personal. Faktor lingkungan organisasi dapat mempengaruhi jalannya implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baru diimplementasikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesuksesan implementasi tersebut. Faktor lingkungan organisasi yang dibahas dalam penelitian ini meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan.

Menurut Boston et al (1996) mengidentifikasi *Public Choice Theory*, teori agensi dan *transactional cost economics* sebagai paradigma yang dominan ketika siap untuk mereformasi pemerintah. *Public Choice Theory* menganggap semua tingkah laku manusia didominasi oleh kepentingan pribadi, *public choice* diaplikasikan sebagai usaha untuk peran pemerintah, meningkatkan transparansi dan lain-lain. Teori Agensi dengan asumsi peningkatan kepentingan pribadi yang menyebabkan konflik antara principal dan kontraktual untuk mengetahui masalah moral hazard dan asimetri informasi, *transactional cost economics* berfokus pada struktur pemerintahan yang optimal. Menurut Yin (1994) melakukan penelitian dengan *multiple-case design* dengan sub unit yang menjadi peran penting. Fokus pada orang-orang yang memiliki pengaruh dalam organisasi secara umum dan Pentigrow (1992) melakukan penelitian yang lebih spesifik yang menyadari pentingnya kelas eksekutif inti yang mengontrol pengendalian dan alokasi sumber daya. Dezin (1978) meneliti gambaran dari unsur pokok organisasi yang terpisah (manajemen dan anggota yang dipilih) dengan menggunakan data, laporan informasi keuangan dalam *local authorities*. Penelitian ini telah menggunakan wawancara *semi directed*.

Yang diinterview adalah CEO (*Chief Executive Officer*), direktur keuangan, direktur strategi dan orang-orang yang memegang peran pokok (pendidikan, pelayanan, sosial, ekonomi).

Contingency theory, dipelopori oleh Burn dan Stalker (Otley, 1980), dalam penelitian tahun 1950-an di Inggris tentang task environment, dalam penelitiannya mengidentifikasi tipe struktur dan praktik menejemen yang tepat untuk berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa organisasi yang mekanistik (dengan ciri-ciri pembagian tugas yang spesifik dan tetap) tepat untuk lingkungan yang stabil, sedangkan organisasi yang dinamis (dengan ciri-ciri struktur yang fleksibel) tepat untuk lingkungan yang tidak stabil. Otley (1980), menyatakan teori kontijensi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem yang secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi sistem akuntansi tersebut tergantung pada faktor-faktor situasional dalam organisasi. Kesesuaian (*fit*) yang lebih baik antara sistem pengawasan dengan variabel kontijensi menghasilkan kinerja organisasi yang meningkat. Berdasarkan pada *Contingency theory*, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi, sistem pengelolaan keuangan daerah, tergantung pada kondisi Pemda yang bersangkutan.

GAMBAR 1.STRUKTUR ORGANISASI APBD DI PEMERINTAHAN KOTA KEDIRI



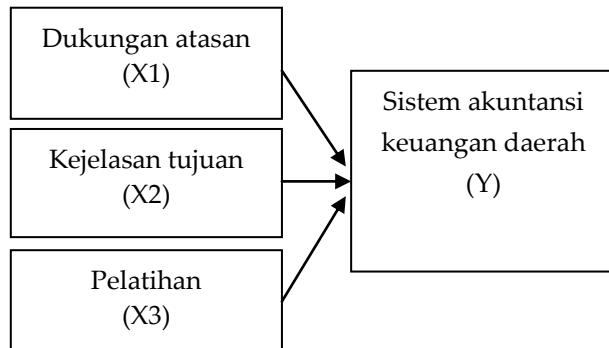
Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP), pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Selanjutnya berdasarkan pasal 308 dan pasal 309 Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan didukung oleh beberapa teori maupun pemikiran yang ada diatas, diajukan hipotesis sebagai berikut: faktor dukungan atasan (X_1), Kejelasan tujuan (X_2) dan pelatihan (X_3) berpengaruh signifikanpositif terhadap peningkatan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (Y_1).

Adapun model hipotesis penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Hipotesis

GAMBAR 2. MODEL HIPOTESIS



METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian Yang Digunakan

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *explanatory research*, karena merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis. Menurut Umar (1998), desain kausal berguna untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan survei, Kerlinger (1993), mengatakan penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologi maupun psikologis. Singarimbun dan Effendi (1989), yang disebut penelitian survei artinya bahwa informasi yang dikumpulkan responden dengan menggunakan kuesioner.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (1994), bahwa populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Umar (1998), populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

TABEL 1.
KOMPOSISI JUMLAH SAMPEL

No.	Kantor	Distribusi Kuesioner
1	Kantor Lingkungan Hidup	5
2	Dinas Pendidikan	5
3	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5
4	Dinas Kesehatan	5
5	Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan	5
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	5
7	Badan Kepegawaian Daerah	5
8	Kantor Satpol PP	5
9	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olah Raga (Disbudparpora)	5
10	Dinas Pasar	5
11	Kantor PDE (Pengolahan Data Elektronik)	5
12	Dinas Pekerjaan Umum	5
13	Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda)	5
14	Kantor Kecamatan	5
15	Kantor Kelurahan	20
	Jumlah kuesioner yang didistribusikan	100

Agung (1992) berpendapat bahwa sampel adalah himpunan unit observasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi. Sedangkan Umar (1998), bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah merupakan bagian kecil dari suatu populasi. Dengan demikian yang dimaksud dengan sampel dalam penelitian ini adalah PNS yang bekerja di bagian keuangan kantor

pemerintahan Kota Kediri dengan masa jabatan lebih dari 1 tahun

Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini agar dapat mengukur variabel yang tepat dan relevan maka diperlukan adanya suatu alat ukur untuk pengumpulan data yang valid dan reliabel.

Uji Validitas

Instrumen penelitian ini dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Singarimbun & Effendi (1989) berpendapat bahwa validitas menunjukkan tingkat kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Menurut Umar (1998) untuk menguji validitas instrumen dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor setiap item dengan total skor variabelnya melalui teknik korelasi "product moment", dengan rumusan sebagai berikut:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi antara item (x) dengan skor total

X = skor jawaban setiap item

Y = skor total

N = jumlah subyek uji coba

Dalam pengujian ini validitas selanjutnya, ditentukan tingkat derajat kesalahan 10 % ($\alpha = 0,10$). Artinya suatu item pertanyaan atau pernyataan dapat dikatakan valid, jika nilai p (probability) kurang dari 0,10 ($p < \alpha 0,10$)

Uji Reliabilitas

Singarimbun & Effendi (1989) reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. Menurut Arikunto (1993), pengujian reliabilitas data yang didapat dianalisis dengan teknik reliabilitas alpha cronbach atau yang dikenal

dengan sistem SIA (*Standardized Item Alpha*), yang rumusnya seperti berikut:

$$\alpha_{hit} = \frac{k r}{r(k-1)+1}$$

Keterangan: k = jumlah butir item pertanyaan

r = rata-rata nilai korelasi

α = alpha

Penghitungan pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai α dengan nilai tabel reliabilitas dari Ebel dan Frisbie (tabel 3). Jika nilai $\alpha > r$ tabel maka dianggap reliabel.

TABEL 2. HUBUNGAN JUMLAH BUTIR DENGAN RELIABILITAS INSTRUMEN

Jumlah Butir	Reliabilitas
5	0,20
10	0,33
20	0,50
40	0,67
80	0,80
160	0,89

Sumber : Diadaptasi dari Ebel dan Frisbie (1991)

Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data menurut Nasir (1985), mengungkapkan bahwa setelah data didapat dan agar data tersebut bermakna maka data harus dianalisis yang sesuai dan mudah dipahami. Menurut Hakim dan Kumadji (1997) Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial.

1. **Analisis Deskriptif.** Analisis deskriptif merupakan analisis yang menitik beratkan pada penggambaran atau deskripsi data yang telah diperoleh. Analisis ini digunakan untuk menjawab tujuan penelitian satu dan dua, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan dan pemanfaatan informasi terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Kegunaan Daerah.
2. **Analisis Inferensial.** Analisis inferensial merupakan analisis data kuantitatif dengan pendekatan statistik dan matematik. Analisis ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang

diajukan dengan menggunakan analisis korelasi dan regresi linier berganda, dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah

X_1 = Pelatihan

X_2 = Kejelasan tujuan

X_3 = Dukungan atasan

a_0 = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

e = Faktor pengganggu

Selanjutnya dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda tersebut dapat dilakukan analisis nilai sebagai berikut:

1. Uji F , untuk menguji keberartian koefisien regresi secara keseluruhan dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel pada tingkat kepercayaan $\alpha = 0,10$. Bila F hitung $> F$ tabel maka hipotesis diterima.
2. Uji t , yaitu untuk menguji keberartian koefisien secara parsial, dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada tingkat kepercayaan $\alpha = 0,10$. Bila t hitung $> t$ tabel maka hipotesis diterima.
3. Nilai R^2 (*koefisien determinasi*), untuk mengetahui berapa % pengaruh variabel bebas (X) yang dimasukkan dalam model mempengaruhi variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model. Gujarati (1991) model dianggap baik bila koefisien determinasi sama dengan satu atau mendekati satu.
4. Nilai r (*koefisien Korelasi Parsial*), untuk mengukur kedekatan hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai r parsial mempunyai jarak -1 sampai $+1$, apabila makin mendekati -1 atau $+1$ berarti makin erat hubungan negatif atau positif. Apabila nilai r mendekati nol berarti terdapat kekuatan hubungan yang lemah, sebaliknya jika nilai yang paling besar diantara variabel-variabel

bebas menunjukkan variabel tersebut paling kuat hubungannya dengan variabel-variabel bebas menunjukkan variabel tersebut paling kuat hubungannya dengan variabel terikat.

Pengujian Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (1991) pengujian hipotesis, agar diperoleh nilai perkiraan yang tidak bias dan efisien dari model persamaan regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa atau OLS (*Ordinary Least Square*) terhadap tiga atau lebih variabel yang diamati, maka haruslah memenuhi asumsi-asumsi klasik sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Kolinearitas Ganda (Multicollinearity)

Gujarati (1991) mengemukakan bahwa multikolinearitas berarti adanya korelasi linier yang tinggi (mendekati sempurna), diantara dua variabel atau lebih variabel bebas. Untuk mengetahui tidak adanya multikolinearitas, digunakan Uji "Variance Inflation Factor" (Vif), yaitu jika nilai VIF < 10 berarti tidak terjadi kolinearitas antara variabel bebas.

2. Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi dasar dari regresi linier adalah variabel residual harus sama untuk semua pengamatan atau yang disebut homoskedastisitas. Oleh karena itu menurut Gujarati (1991) untuk mengetahui terjadinya heteroskedastisitas atau homoskedastisitas perlu dilakukan pengujian Glejser (*Glejser test*). Jika hasil pengujian menunjukkan nilai Sign T $> \alpha = 0,10$, maka homogenitas ragam terpenuhi atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Asumsi Autokorelasi

Uji asumsi autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi hubungan atau tidak antara data pengamatan. Gujarati (1991) autokorelasi terjadi korelasi diantara data pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Untuk mengetahui adanya autokorelasi menggunakan teknik uji Durbin Watson *d Test*. Jika nilai uji Durbin Watson mendekati dua, maka tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Asumsi Kenormalan

Uji asumsi kenormalan adalah untuk melihat apakah nilai residual tersebut normal

atau tidak. Jika uji kenormalan menggunakan *Komogorov-Smirnov Goodness of Fit Test*, Residual tersebut secara normal, jika $2\text{-tailed } p > \alpha$.

5. Uji Asumsi Linearitas

Pengujian linearitas menggunakan *Standarized Scatterplot*, yaitu dengan melihat distribusi atau penyebaran nilai residual. Jika tersebar acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka asumsi linearitas terpenuhi.

Instrumen Penelitian

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Path Analysis* atau analisis jalur. *Path Analysis* atau analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linier ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X_1, X_2, X_3 terhadap Y. Teknik analisis jalur ini menggunakan program *Analisis of Moment Structure 4.01 (AMOS 4.01)*.

Prosedur Pengumpulan Data

Kuesioner disebarluaskan dengan caramengantar langsung kepada responden. Waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data selama 2 minggu. Kuesioner yang disebarluaskan sejumlah

100 eksemplar dan diharapkan kuesioner bisa kembali minimal 50 eksemplar. Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel terhadap responden yang mudah ditemui dan bersedia menjadi sampel.

Sumber Kuesioner

Kuesioner yang dipakai pada penelitian ini adalah kuesioner penelitian dari Shoff Yatuz Zahro yang berjudul "Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus Instansi Pemerintahan se-Kota Madiun)".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kediri dengan mengambil sampel pegawai negeri yang menjabat sebagai bendahara di instansi Pemerintahan Kota Kediri. Adapun daftar dinas yang diberikan kuesioner adalah sebagai berikut:

TABEL 3. DAFTAR DINAS DI PEMERINTAHAN KOTA KEDIRI YANG DIBERIKAN

No.	Kantor	Distribusi Kuesioner	Kuesioner Kembali
1	Kantor Lingkungan Hidup	5	2
2	Dinas Pendidikan	5	5
3	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5	2
4	Dinas Kesehatan	5	5
5	Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan	5	2
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	5	5
7	Badan Kepegawaian Daerah	5	5
8	Kantor Satpol PP	5	5
9	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olah Raga (Disbudparpora)	5	5
10	Dinas Pasar	5	2
11	Kantor PDE (Pengolahan Data Elektronik)	5	5
12	Dinas Pekerjaan Umum	5	5
13	Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah	5	2

	(Bappeda)		
14	Kantor Kecamatan	5	5
15	Kantor Kelurahan	20	20
	Jumlah kuesioner yang didistribusikan	100	75
	% tingkat pengembalian kuesioner		75 %
	% data yang tidak diolah peneliti dikarenakan: data tidak kembali ke peneliti dan pengisian data tidak lengkap		25%

Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel terhadap responden yang mudah ditemui dan bersedia menjadi sampel. Dari 100 kuesioner yang dibagikan, ada 75 kuesioner yang kembali. Kemudian dari jumlah tersebut, seluruh kuesioner diisi secara lengkap, sehingga seluruhnya dapat digunakan dalam analisa data

TABEL 4.TABEL KORELASI

Kor elasi ting gi	Kor elasi ren dah	Tan pa kor elas i	Tid ak ada kor elas i	Kol era si ren dah	Kor elasi sed ang	Kor elasi ting gi
-1	< -0,4	> -0,4	0	< 0,4	< 0,9	1

a. Uji t (untuk Uji Hipotesis)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Variabel dukungan atasannya memiliki nilai $t = 3,438$ lebih besar dari t tabel yaitu ($3,438 > 2,042$) dengan nilai p-value sebesar 0,001 diterima pada taraf signifikansi 5% ($p<0,05$). Nilai positif menunjukkan pengaruh positif. Artinya dukungan atasannya berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan H1 dinyatakan diterima.

Variabel kejelasan tujuan memiliki nilai $t = 3,047$ lebih besar dari t tabel sebesar 2,042 yaitu $3,047 > 2,042$

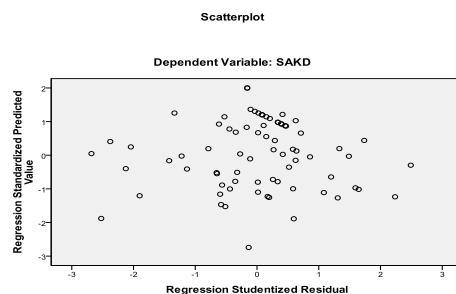
atau nilai p-value sebesar 0,003 diterima pada taraf signifikansi 5% ($p<0,05$). Artinya kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan H2 dinyatakan diterima.

Variabel pelatihan memiliki nilai $t = 1,346$ lebih kecil dari t tabel sebesar 2,042 yaitu $1,346 < 2,042$ atau nilai p-value sebesar 0,183 ditolak pada taraf signifikansi 5% ($p>0,05$). Artinya pelatihan tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Pada penelitian terdahulu dinyatakan bahwa pelatihan berpengaruh pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, tetapi di penelitian ini pelatihan tidak berpengaruh pada kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dikarenakan fenomena yang terdapat dilapangan dimana pelatihan yang diadakan berkaitan dengan kegunaan SAKD masih kurang, selain itu latarbelakang pendidikan pegawai atau staf di bagian keuangan bukan dari jurusan akuntansi mengakibatkan pencapaian hasil belum sesuai dengan apa yang diharapkan, pelatihan yang dilakukan belum mengikuti sertakan seluruh pegawai pada bidang keuangan, perpindahan jabatan serta disebabkan bergantinya regulasi baru, pelatihan yang satu belum terampil sudah disusul dengan pelatihan baru ini akan mengakibatkan kebingungan para pengelola keuangan di SKPD.

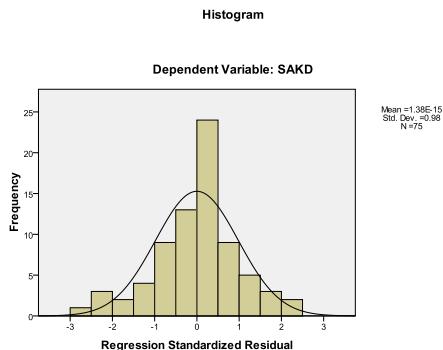
Tabel 5.Uji T

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
(Constant)	- .492	.624		

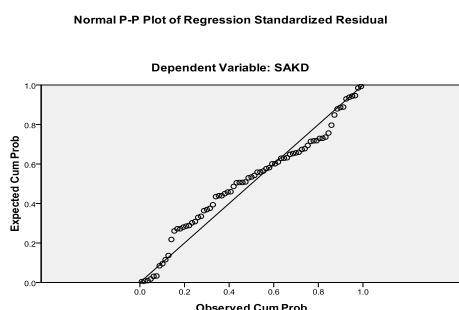
dukungan atasan	3.438	.001	.412	2.430
kejelasan tujuan	3.047	.003	.618	1.619
pelatihan	1.346	.183	.497	2.012
a. Dependent Variable: SAKD				



GAMBAR 3. UJI NORMALITAS



GAMBAR 4. UJI MULTICOLLINEARITY



Pada gambar 4 menunjukkan bahwa pada data penelitian ini menggunakan data toleransi signifikan dan data VIF untuk uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengukur arah dan besarnya pengaruh variabel independen secara akurat.

**GAMBAR 5. UJI ASUMSI
HETEROSKEDASTISITAS**

Uji heteroskedasis bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual yang satu dengan yang lainnya. Apakah termasuk dalam heteroskedasis atau termasuk dalam homoskedasis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari faktor organisasi yang diuji, faktor keperilakuan organisasi yang meliputi dukungan atasan dan kejelasan tujuan mempengaruhi SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah).

Penelitian ini mempunyai implikasi yang luas dimasa yang akan datang, khususnya untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hubungan faktor perilaku dalam implementasi inovasi sistem. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada Pemerintah Daerah bahwa kesuksesan implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis dan dana saja, namun faktor perilaku dari pengguna juga perlu diperhatikan.

Dalam penelitian ini pengambilan responden terbatas pada bagian keuangan saja di beberapa instansi di Kota Kediri, sehingga kemungkinan akan menghasilkan hasil yang berbeda, maka perlu diperluas dibagian-bagian yang lain dan instansi yang lebih banyak lagi.

Saran

Penelitian ini selanjutnya dapat menambah variabel lain tidak terbatas pada faktor perilaku tapi juga faktor teknis dalam rangka implementasi SAKD perlu untuk diteliti. Perlu penelitian dengan sampel yang lebih banyak dan tidak terbatas pada Dinas,

Kantor dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah saja, namun diperluas untuk seluruh Dinas di Pemerintahan Kota maupun Pemerintahan Kabupaten. Perlu pengembangan instrumen, yaitu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari obyek yang diteliti.

Keterbatasan

1. Hasil pengujian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya kemungkinan juga diakibatkan oleh perbedaan obyek yang diteliti.
2. Responden penelitian terbatas pada wilayah Kota Kediri sajasehingga kemungkinan akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan peneliti sebelumnya, maka perlu diperluas di wilayah Kabupaten dan propinsi lain di Indonesia supaya dapat digeneralisasi.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu waktu (*cross sectional*) sehingga ada kemungkinan perilaku individu berubah dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, 2009, Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Pemda di Jawa Tengah), *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Abdul Halim, 2002, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, Yogyakarta: Seri bunga rampai
- Amason A. C dan D. M Schwigner (1994), *Resolving the paradox of conflict, strategy decision making and organization performance, International journal of conflict management*
- Bandura. (1997) *Sosial Cognitive Theory of Organizational Management, Academy of Management Review, Vol 14:361-384*
- Bastari, Imam, 2007, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Wujud Informasi Manajemen Keungan Daerah Jurnal Akuntansi Bisnis Anggota Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
- Chenhall, R.H (2004). *The Role of Cognitif and Affective Conflict in Early Implementation of Activity-Based Cost Management Behavioral Reasech in Accounting 16*.
- Doyle J, W Ge and Mc Vay, (2006). Determinants of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting *Journal of Accounting and Economics*
- Forum Dosen Akuntansi Telaah Krisis PP Nomor 24 Tahun 2004. BPFE, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam, (2008). Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 16.0 Bagian Penerbita Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hadi, S. (1989) *Statistik 2*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Hakim, A & Kumadji, S (1997) *Pengantar Statistika*, Cetakan Pertama, CV Citra Media, Surabaya.
- Hartono, (2004). Metodologi Penelitian Salah Kaprah dan Pengalaman, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Heri Hidayat,(2008). Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD) Way Kanan Dengan Peraturan Pemerintah N0.58 Tahun 2005 dan Peraturan Mentri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Thesis S2 Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Imelda, 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Jogianto, 2005. Metodologi Penelitian Bisnis, Yogyakarta: BPFE
- Latifah, Lyna dan Arifin Sabeni, Faktor Keperilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi X 2007, Universitas Hasanudin 26-28 Juli, Makasar

- Luthans, Fred (1995) *Organizational Behavior*, Sevent Edition, Internaional Ediion, McGraw-Hill, Inc., New York.
- Nimran, U. (1997) *Perilaku Organisasi*, Cetakan Pertama, CV. Citramedia, Surabaya.
- Nirzawar, Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN 2001
- Nurlela, Siti Rahmawati, Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemda Subosukowonosraten, Simposium Nasional Akuntansi XII 2010, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rahman, Syaiful, Muhammad Nasih dan Sri Handayani 2007. Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kejelasan Peran, Pemberdayaan Psikologis Dan Kinerja Manajerial (Pendekatan Partial Least Square) Penelitian Terhadap Manajer Perusahaan Manufaktur Di Jawa Tengah). Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar, 2007 AMKP-01
- Republik Indonesia. Undang-undang RI. No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang RI. No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang RI. No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. Undang-undang RI. No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-undang RI. No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-undang RI. No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang RI. No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Robbins, Stephen P. (1989), *Organization Behaviour Concept, Controversies and Application*. Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall.
- Robbins, Stephen P. (1996) *Perilaku Organisas: Konsep – Kontroversi – Aplikasi*, jilid 1, Alih Bahasa Hadyana Pujaatmaka, Prenhallindo, Jakarta.
- Shields, M.D and S. M Young. (1995). Behavioral Model for Implementing Cost Management Sistem, Journal of Cost Management (Winter), 17:25.
- Sugiono, 2009. Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek PT Bineka Cipta Jakarta
- Suwarjono, 2006, Studi Kebutuhan Informasi Penggunaan Laoran Keuangan Pemerintah, Simposium Nasional Akuntansi XII 2009, Palembang
- Tampubolon, Manahan p. (2004). *Perilaku Keorganisasian Edisi 1*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Tim Pokja (2001), *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*: Jakarta.
- Wexley, K.N. & Yukl, G.A. (1992) *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalia*, Edisi Bahasa Indonesia, Ceakan Kedua, Penerjemah Muh. Shabaruddin, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.